

## DUNIA DALAM CENGKERAMAN *INVISIBLE HAND*

(Telaah Kritis Atas Globalisasi Melalui Mega Proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate*)

Nyoman Ayu Sukma Pramestisari  
Magister Sosiologi Universitas Gajah Mada  
Allgtr.asp@gmail.com

### Abstrak

The Mega Agenda of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project in Papua is one of the global efforts to respond the 2008 world food crisis. This project includes the procurement of food and energy barns for world needs. Around one million hectares of land were cleared for extractive industries in the form of corn, palm oil, rice and sugar cane in the hope of absorbing the local workforce. Unfortunately, this industrialization process has implications for the loss of forests as a source of life, drought, the environment polluted by extractive industrial waste, exploitation of workers also horizontal conflicts. Through the Empire and Multitude approach by Negri and Hardt the analysis leads to the occurrence of biased interests of local, national and global elites as empire in the MIFEE project. With the main principle of neoliberalism, namely the accumulation of capital, the empire exploits natural and human resources on the pretext of global interests. Seeing the struggles of the people are often accommodated by political *divide et impera*, the offer of multitude can be an alternative solution. Communities all over the world can help in their own ways in the simplest lines, such as reducing consumptive actions and saving lives.

**Keywords:** *Invisible Hand, MIFEE, Globalisasi*

### I. PENDAHULUAN

*“Disobedience to authority is one of the most natural and healthy acts.”* (Negri & Hardt).

Pembangunan pada tahun 1980 di Indonesia tumbuh sebagai wacana sekaligus implementasi guna membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Adopsi pembangunan sebagai produk paradigma barat secara signifikan mengubah tatanan negara khususnya infrastruktur. Infrastruktur menjadi instrumen vital bagi pengembangan pembangunan berorientasi pada industrialisasi. Penerapan

pembangunan dengan penekanan pada industrialisasi dilakukan sebagai upaya meninggalkan keterbelakangan dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengejar negara maju (Hadirman, 2017). Maka dari itu, pada era orde baru pemerintah mendorong industrialisasi dengan membuka akses pada sistem neo liberalisme, sehingga lembaga donor global seperti IMF, Bank Dunia dan WTO dapat masuk baik sebagai pendonor maupun arahan pembangunan ekonomi bagi sebuah negara. Trajektori sejarah ini secara

tegas telah menjelaskan bahwa bagaimana pembangunan di Indonesia merupakan implikasi atas globalisasi, termasuk penandatanganan Letter of Intent dengan IMF pada tahun 1998.

Dinamika industrialisasi di Indonesia hingga kini nampak belum sepenuhnya mencapai cita-cita mensejahterakan masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan telah masuk dalam agenda politik nasional, nampak selama 39 tahun justru yang terjadi ialah jurang kesenjangan dalam masyarakat semakin melebar. Penurunan jumlah penduduk miskin nampak tidak sejalan dengan implementasi industrialisasi yang kerap memicu ketegangan sosial. Implikasi negatif atas industrialisasi sebagai produk globalisasi sejalan dengan bagaimana perspektif kritis memandang globalisasi sebagai proyek yang hanya menguntungkan sebuah negara yang telah siap berkompetisi baik secara sumber daya manusia dan modal (Wibowo & Wahono, 2003). Sebaliknya, apabila negara tidak sanggup bersaing maka akan tersingkir dari persaingan global, meningkatkan ketergantungan dan menciptakan masyarakat marjinal.

Beberapa kasus menunjukkan iklim industrialisasi di Indonesia cenderung disambut dengan gerakan kontra pembangunan oleh

masyarakat setempat sebagai isu lokalitas hingga isu nasional, baik industri manufaktur maupun ekstraktif. Dalam sepuluh tahun terakhir misalnya beberapa kasus populer seperti penolakan *New Yogyakarta International Airport*, penolakan pabrik semen di Rembang, penolakan Reklamasi Teluk Benoa di Bali, penolakan Reklamasi Teluk Jakarta dan penolakan mega proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* di Papua. Menjadi menarik ketika kasus MIFEE sebagai proyek pengembangan industri ekstraktif nampak padam dari liputan media sehingga informasi pada masyarakat menjadi sangat terbatas bahkan hampir tidak ada sama sekali. Padahal jika dicermati, proyek MIFEE dilakukan dalam rangka mengatasi isu ketahanan pangan global dengan melakukan pembukaan lahan sekitar satu juta hektare yang dibebani hak ulayat (Ismira, 2014).

Proyek kelahiran tahun 2008 ini setidaknya dikelola oleh 46 korporasi yang telah menerima izin pemanfaatan lahan, diantaranya Sinar Mas, Dongin Prabhawa dan PT. Rajawali. Niat mulia yang terbalut dalam wacana sebagai penyelamat krisis global nampak tidak sejalan ketika melihat realita masyarakat terdampak khususnya masyarakat asli suku Malind. Kompensasi berupa uang tunai, sarana pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan bagi masyarakat lokal dianggap

sebagai pemanis karena tidak sepenuhnya terealisasikan. Alih-alih mendapatkan kompensasi ganti untung, masyarakat justru lebih banyak terpapar risiko seperti kehilangan hutan sebagai sumber penghidupan, pencemaran air akibat limbah kelapa sawit, konflik horizontal antar anggota adat hingga kekurangan gizi serta gangguan kesehatan (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011).

Kompleksitas permasalahan implikasi globalisasi dalam produk sebarannya yaitu industrialisasi dengan dalih mensejahterakan masyarakat justru menjerumuskan masyarakat ke dalam perangkap kemiskinan menjadi sebuah refleksi bersifat paradoks. Bertolak dari paradoks tersebut, tulisan ini hadir guna menyoal secara spesifik kasus mega proyek MIFEE dalam konteks globalisasi sebagai sebuah proyek kepentingan segelintir elite. Penggunaan data sekunder dalam tulisan ini diperoleh melalui literatur terdahulu baik buku, jurnal, berita maupun dokumen di media cetak maupun online. Guna mempertajam analisis akan dihadirkan berbagai perspektif sosial terkhusus Teori Multitude dan Empire milik Antonio Negri dan Michael Hardt.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjelaskan kepentingan global beserta elit global perlu dilakukan pemetaan atas kompleksitas permasalahan MIFEE. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif demi menjelaskan kemampuan masyarakat dalam menjawab tantangan gelombang besar tersebut. Kualitatif deskriptif mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif. Penelitian difokuskan pada hal alamiah dengan dimotori oleh peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2012: 9). Sandelowsky melengkapi paparan tentang deskriptif kualitatif bahwa penelitian ini cenderung tidak melakukan interpretasi data secara mendalam. Penelitian menggambarkan simpulan yang komprehensif atas suatu fenomena atau kejadian dalam bahasa sehari-hari. Metode penelitian deskriptif kualitatif cenderung bersifat eklektik dan didasarkan oleh pendapat umum inkuiri naturalistik (dalam Polit, 2003, h. 263). Melalui proses penggalian data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menyajikan tindak konsumerisme masyarakat dalam merespon mega proyek MIFEE.

## III. PEMBAHASAN

### A. Industri Ekstratif MIFEE: Sebuah Perjuangan Neo Liberalisme

Peristiwa *baby boom* paska perang dunia II menyebabkan jumlah penduduk meledak

secara signifikan. Bertambahnya jumlah penduduk dalam era kontemporer sejalan dengan peningkatan kebutuhan atas lahan. Pada tahun 2008 menjadi titik tolak menyoal perbincangan dunia global terkait isu ketahanan pangan dengan menetapkan Indonesia khususnya Merauke sebagai daerah penyokong kebutuhan pangan dunia. Keputusan ini menimbang aspek ketersediaan lahan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan nasional. Berangkat dari segala pertimbangan maka MIFEE sebagai proyek *food estate* dijalankan dengan membuka lahan ulayat setidaknya sejumlah satu juta hektare (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011).

Melacak posisi MIFEE sebagai agenda mulia, secara kritis mulai menyurut ketika mengetahui keberadaannya di bawah kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi (MP3EI). Kebijakan MP3EI diterbitkan pada tahun 2011 menargetkan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 mencapai USD 16.000. Maka dari itu, program pembangunan digencarkan dengan menggandeng pemodal baik asing maupun dalam negeri mengingat keterbatasan dana negara apabila melakukan pembangunan tanpa melibatkan investor. Telaah kritis akan kebijakan MP3EI nampak pada implementasi prinsip neoliberal demi

menarik investor berpartisipasi yaitu deregulasi, privatisasi dan liberalisasi.

Tiga keyakinan utama atas pembangunan ekonomi dari sistem neoliberal ini meyakini dengan minimalisasi peran pemerintah terkait kebijakan yang menekan investor (deregulasi), membebaskan investasi serta perdagangan komoditi barang dan jasa (liberalisasi) serta mengizinkan swastanisasi sektor publik dan mendorong korporasi mengembangkan diri (privatisasi) akan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian suatu negara (Wibowo & Wahono, 2003). Ketiga pilar inilah yang diadopsi pada pembangunan Indonesia termasuk tersirat dalam program MP3EI dengan beberapa turunan kebijakan praktis salah satunya mega proyek MIFEE.

Pengaruh global dalam menekankan kepentingan persaingan antar negara melalui meninggalkan keterbelakangan sangat mencerminkan prinsip ekonomi deterministik. Bertolak dari berbagai gagasan mulia yang terlontar dalam berbagai wacana, proyek MIFEE justru nampak tidak memuliakan masyarakat setempat. Masyarakat suku Malind Merauke selalu mempertanyakan “Apa tujuan dari proyek MIFEE?”. Lontaran pertanyaan tersebut lahir begitu saja sebab masyarakat lokal merasa hadirnya proyek MIFEE tidak membawa signifikansi perbaikan kehidupan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan industri

ekstraktif seperti perkebunan sawit, padi, tebu dan jagung dilakukan melalui perampasan lahan adat dengan beban ulayat (AwasMiffee, 2017). Ironinya, keterikatan masyarakat Malind dengan lahan adat sebagai sumber penghidupan sangat erat sehingga ketika terjadi perampasan lahan adat maka serta merta merampas penghidupan masyarakat setempat.

Kehilangan alat produksi oleh masyarakat suku Malind berimplikasi buruk hampir setiap aspek kehidupan baik individu, keluarga dan kelompok (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011). *Pertama*, pelepasan lahan dimulai dari pendekatan dengan kepala suku karena memiliki otoritas atas beberapa keputusan terkait permasalahan adat termasuk lahan ulayat. Penawaran kompensasi umumnya meliputi uang ganti rugi, pekerjaan bagi masyarakat, pengadaan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat lokal. Meskipun begitu disebagian besar kasus masyarakat melakukan resistensi terkait upaya proses industrialisasi karena merasa terancam kehilangan penghidupan. Dalam tataran ini, menjadi relevan bagaimana implikasi spirit globalisasi mengenai pembangunan berdampak signifikan pada tercerabutnya masyarakat dari sistem nilai, norma dan budaya yang menjadi panutan (Eller, 1989). Cara hidup selama bertahun-tahun masyarakat Malind dengan menggantungkan diri kepada alam seperti

memburu dan meramu terpaksa dicerabut akibat praksis dari pembangunan nasional berskala global.

Beragam wajah perjuangan pernah dilakukan dengan partisipasi publik hingga skala global. Dalam beberapa forum, diskusi serta gerakan sosial pernah dilakukan guna mengkaji kembali kebijakan MIFEE nampak gagal. Kegagalan spirit emansipatoris disebabkan oleh beragam upaya pemangku kepentingan demi menyukseskan proyek mereka. Tindak dominasi ditempuh diantaranya dengan memanfaatkan aparat negara TNI termasuk dengan cara represif jika terjadi resistensi oleh masyarakat, menerapkan politik *divide et impera* melalui akomodasi terhadap beberapa kepentingan masyarakat atau suap kepala suku serta mempekerjakan beberapa keluarga di industri mereka (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011). Upaya ini akhirnya menyebabkan konflik horizontal di tengah masyarakat akibat produksi kecemburuan sosial. Upaya hegemoni melalui produksi wacana oleh para oligarki dalam tataran ini nampak cukup efektif guna menekan *counter hegemony* dari masyarakat kontra MIFEE.

Kedua, paska keberalanjutan segenap program MIFEE kompensasi terkesan semakin klise akibat tidak terealisasi secara penuh. Sarana publik seperti kesehatan dan sekolah masih belum mampu diakses oleh masyarakat

sekitar. Kompensasi ganti untung semakin diyakini sebagai mimpi indah sebab masyarakat justru mengalami kenyataan pahit. Setelah kehilangan alat produksi, masyarakat justru terdampak dari pembangunan seperti kekeringan, gizi buruk, gangguan kesehatan serta ketahanan pangan masyarakat lokal terganggu. Sekalipun masyarakat bekerja di industri ekstraktif, perolehan gaji dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga akibat tarif gaji tergolong rendah yaitu 1,8 juta. Kondisi ini tentu berbeda ketika hutan ulayat masih menjadi hak mereka, berburu rusa, ikan dan mencari sagu menjadi hal mudah. Maka dari itu, pemaksaan transformasi masyarakat subsisten menuju masyarakat industri tanpa pengimbangan sumber daya manusia hanya akan memperlebar jurang kesenjangan di masyarakat.

Status Hak Guna Lahan yang melekat selama kontrak 35 tahun untuk para investor MIFEE tetap saja menjadi mimpi buruk bagi masyarakat adat. Hal ini dikarenakan selain kontrak dapat saja diperpanjang, sekalipun hak ulayat pemanfaatan hutan telah kembali, kondisi hutan tidak akan sama seperti dulu. Spirit perjuangan menuntut berbagai hak baik sebagai buruh pekerja maupun masyarakat menjadi sulit untuk dilakukan akibat ketakutan kehilangan sumber kehidupan, lagi. Resistensi menjadi mustahil mengingat pengusaha dapat

saja dengan mudah mengganti buruh ketika dianggap terlalu menyusahkan dalam kegiatan industri.

Upaya hegemoni dan dominasi para oligarki melalui produksi wacana maupun praktek tindakan secara persuasif maupun represif sesungguhnya berangkat dari spirit neo liberalisme terkait akumulasi kapital. Neo liberalisme meyakini kemajuan perekonomian harus dilakukan sebagai upaya bersaing dan bertahan di ranah global dengan mengakumulasikan kapital semaksimal mungkin. Siapapun dapat menjadi aktor termasuk pemerintah, institusi, kelompok maupun individu (Wibowo & Wahono, 2003). Maka dari itu, ketika memahami kasus MIFEE terlihat bagaimana program pemerintah nampak tidak tuntas dalam hal *social assesment* terkait menyikapi berbagai risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat. Disisi lain, ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi sangat kental terasa melalui berbagai kebijakan penyokong investor seperti MP3EI dan Perpres No 40 Tahun 2013 hingga melibatkan aparat negara untuk menyelesaikan jika terjadi upaya perlawanan terhadap proyek MIFEE.

Refleksi kritis atas permasalahan ini bermuara pada bagaimana perspektif neo liberalisme telah menginfeksi ke dalam proyek pembangunan pangan dan agrikultural secara global. Melalui isu krisis pangan global, agenda

ekonomi politik global menyelinap sebagai dewi penyelamat dalam isu ini. Suntikan dana dari negara-negara kaya modal maupun korporasi dari berbagai negara menanamkan investasi produksi pangan pada lahan-lahan luas umumnya berada di negara berkembang, termasuk Merauke dengan mega proyek MIFEE. Maka dari itu, sifat adaptif sistem kapitalistik dengan spirit neoliberalisme sebagai pendorong globalisasi berselancar melalui hegemoni politik dalam konteks menentukan arah pembangunan di negara sedang berkembang. Pemerintah bahkan ikut berselancar baik sebagai aktor sadar maupun terhegemoni secara politik sehingga mengikuti ide-ide yang disebarakan para pendukung neo liberal.

### **B. Invisible Hand: Pemetaan Aktor Hegemonik**

Pemetaan peran ekonomi politik global neo liberalisme dalam konteks proyek MIFEE memperlihatkan bagaimana hegemoni melalui negosiasi politik, dialog, konstruksi sosial serta teknologi media dilakukan sehingga membentuk berbagai kebijakan nasional yang menopang upaya perluasan kapitalisme. Kasus MIFEE memperkuat globalisasi sebagai sebuah upaya ekspansi kapitalisme dalam proses akumulasi surplus dengan mudah dan efisien. Maka dari itu, dapat dilihat secara kritis bahwa terdapat kepentingan besar dibalik wacana yang

dikembangkan dalam globalisasi sebagai sebuah pencerahan melalui mereduksi batas regional dan waktu.

Pemetaan aktor menjadi penting dalam memahami kasus MIFEE guna melihat kepentingan besar apa yang melatarbelakangi keteguhan pemerintah melakukan mega proyek MIFEE disamping mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perspektif Negri dan Hardt terkait Empire menjadi relevan untuk analisis kasus ini. Negri dan Hardt memandang era kontemporer dewasa ini membentuk tatanan global baru dari proses yang kontemporer hingga mewujudkan *network power* (Hardt & Negri, 2000). Kedaulatan baru terdiri dari elemen penting seperti negara-negara dominan, institusi supranasional, korporasi kapitalis dan sebagainya. Pada konteks ini, kekuatan masing-masing aktor tidak sama besar, tetapi mereka mampu melengkapi satu sama lain dengan bekerjasama mewujudkan tujuan mereka, yaitu melanggengkan tatanan global beserta hierarki di dalamnya.

Empire dalam konteks mega proyek MIFEE tidak dapat ditentukan melalui satu aktor tunggal baik negara, individu, kelompok maupun institusi adikuasa yang powerfull. Aspek kolaboratif lintas batas lebih mencolok dalam peran berbagai kapitalis pemangku kepentingan dengan membawa isu global sebagai dalih pembenaran atas wujud

pembangunan merujuk pada industrialisasi MIFEE. Seluruh stakeholder pendukung mega proyek MIFEE baik pemerintah, investor, lembaga donor dunia seperti IMF, Bank Dunia dan WTO termasuk menggunakan aparat negara merupakan suatu sinergi semu dalam sebuah pembangunan dengan pondasi spirit akumulasi kapital dengan memarjinalkan masyarakat. Proses marjinalisasi masyarakat ini sangat berkolerasi dengan sistem kapitalisme dimana akumulasi kapital menjadi kondrat kehidupan sekalipun menyingkirkan yang dianggap merugikan.

Fakta bahwa globalisasi berdampak pada pengambilan keputusan suatu negara tidak lagi independen diperkuat melalui fenomena MIFEE. Pembuatan keputusan tidak lagi bersifat otonom tetapi tergantung oleh berbagai pihak global (Held, 1999). Apabila kita sepakat menyebut fenomena ini sebagai sebuah implikasi negatif maka tonggak awal permasalahan bersumbu ketika krisis ekonomi melanda Eropa dan Amerika tahun 1970an yang melahirkan Konsensus Washington. Melalui konsensus tersebut secara tersirat untuk melakukan globalisasi demi menyelamatkan kondisi keuangan negara. Maka dari itu peran lembaga internasional dalam menentukan peraturan perdagangan lintas negara menjadi penting seperti WTO, GATT, AFTA dan APEC (Hiariej, 2004). Dalam perspektif Soekarno

penyebaran *free market* melalui pembentukan lembaga internasional inilah yang disebut sebagai imperialisme karena dilandasi fenomena krisis ekonomi guna ekspansi para kapitalis (Soekarno, 2004). Agenda ekspansi ini berwujud berbagai ideologi seperti demokrasi, free market termasuk didalamnya privatisasi, deregulasi dan liberalisasi, mempengaruhi para politisi, akademisi serta LSM guna meyakini pentingnya *free market*.

Keberadaan IMF dan Bank Dunia dalam kajian kritis menyebutkan sebagai penyuksesan terhadap kepentingan ekspansi akumulasi kapital. Melalui paradigma pembangunan maka negara berkembang akan membutuhkan modal untuk melakukan pembangunan, disinilah hadir IMF dan Bank Dunia yang dalam beberapa kesempatan muncul sebagai NGO untuk “menyelamatkan” negara agar mampu melakukan pembangunan. Fakta inilah yang pada nyatanya melatarbelakangi mengapa proyek MIFEE ada dan kepentingan besar apa dibalik mega proyek yang memarjinalkan masyarakat Suku Malind. Secara nasional, Indonesia membuka diri atas *free market* dilakukan pada masa orde baru termasuk LOI Soeharto dengan IMF pada krisis moneter 1998. Kini pembangunan dipercepat melalui kebijakan MP3EI dan salah satu turunannya ialah proyek MIFEE.



Realita kritis dibalik seperti pemaparan sebelumnya terkait wacana MIFEE sebagai dewi penyelamat menjadi tidak kasat mata akibat produksi dan reproduksi wacana yang ditebarkan oleh empire. Wacana pangan dan energi non fosil menjadi isu kunci dalam menjalankan proyek dengan memposisikan diri sebagai juru selamat atas krisis pangan dan energi melalui penemuan inovasi baru. Dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas melalui industrialisasi maka hasil produksi akan maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil produksi kepala sawit di Indonesia paska diimbangi dengan optimalisasi teknologi semakin meningkat (Gelbert, 2016). Bahkan mereka meyakini terealisasinya proyek ini akan berdampak baik terhadap masyarakat lokal karena mampu mengentaskan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja di industri ekstraktif, meskipun standar kelayakan pekerja tidak dijelaskan secara gamblang.

Kompleksitas di atas sesungguhnya telah menggambarkan bagaimana para Empire bekerja. Dalam kajian Negri dan Hardt empire tidak dapat dibatasi oleh satu aktor tunggal melainkan berbagai stakeholder adikuasa yang saling melengkapi satu sama lain (Hardt & Negri, 2000) telah terbukti. Maka dari itu, konsep *Invisible Hand* muncul sebagai upaya memahami berbagai agen-agen globalisasi dalam melancarkan praktik kapitalisme di era

kontemporer yang bahkan sangat jarang disadari oleh khalayak umum. Realitas ini menggiring pada bagaimana kesulitan juga dirasakan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan karena tergantung dengan perjanjian lembaga-lembaga perdagangan internasional.

Berbagai kiat empire dalam melakukan hegemoni dan dominasi tercermin melalui cara persuasif hingga represif. Refleksi penulis berujung pada kesimpulan bahwa langkah dalam menyalahkan pemerintah dan menuntut secara tunggal tidaklah dapat dibenarkan sepenuhnya mengingat permasalahan yang terlalu kompleks. Sehingga diperlukan sebuah solusi alternatif yang lebih nyata dan riil dapat dilakukan oleh setiap agen penolak perpanjangan tangan kapitalisme mengingat pasar tidak pernah mengakomodasi moral.

### C. **Multitude: Perjuangan Resistensi Agen Atas Implikasi Globalisasi Menggunakan Cara Globalisasi**

Degradasi moral tergambar jelas ketika memandang melalui kajian kritis atas *free market* sebagai sebuah spirit kolonialisme masa kini. Dalam kasus MIFEE masyarakat terdampak harus menanggung risiko pembangunan terutama masalah kesehatan akibat polusi pembangunan, pencemaran lingkungan serta kehilangan sumber makanan berdampak pada gizi buruk. Masyarakat lokal Malind juga harus mengganggu tercerabut dari sistem budaya lokal mereka, bergantung

kehidupan sebagai buruh pekerja di bawah dominasi perusahaan serta konflik horizontal dengan sesama masyarakat suku Malind.

Resistensi dan upaya perjuangan dengan skala perlawanan bersifat lokalitas dan bersifat langsung nampak kurang maksimal dalam mencapai tujuan. Mengingat masalah ini muncul dikarenakan globalisasi maka diperlukan sebuah alternatif solusi baru dalam melakukan resistensi pada sistem ini. Konsep Negri dan Hardt terkait Multitude secara kontekstual sangat relevan dalam upaya perlawanan sistem neo liberalisme. Multitude menekankan sebuah perlawanan yang dapat dilaksanakan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun dan dengan cara apapun (Hardt & Negri, 2004). Alternatif solusi ini diperlukan menyoal kemandegan perjuangan masyarakat dalam melakukan resistensi akibat wacana *counter hegemony* masih seringkali mampu diakomodir oleh para empire sehingga yang terjadi perpecahan dalam masyarakat kontra empire. Seperti isu pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik mendapatkan respon pengembangan teknologi pengelolaan limbah pabrik, pembuatan drainase ramah lingkungan serta alokasi secuil dana untuk kepentingan masyarakat terdampak, namun tetap spirit utama ialah akumulasi kapital.

Menurut hemat penulis, masyarakat dan dunia hari ini membutuhkan sebuah penyegaran

cara berfikir. Pemikiran kritis diperlukan agar tidak terus menerus masyarakat menjadi objek pasar yang vakum oleh para empire. Ketika memahami konteks kelahiran MIFEE adalah isu ketahanan pangan dan energi global, maka seharusnya upaya perlawanan berkaitan dengan bagaimana masing-masing dari kita mempertahankan ketahanan pangan dan energi. Misalnya menyoal kebutuhan kelapa sawit yang kian meningkat akibat kebutuhan masyarakat dunia sehingga harus dilakukan ekspansi industri kelapa sawit. Mengingat setiap perlawanan dapat dilakukan dimana saja, maka perlawanan utama paling minim namun signifikan ialah menghindari tindak konsumtif. Hemat dalam hal sehari-hari misalnya menggunakan shampo, kondisioner, minyak goreng, detergen dan bahan bakar minyak menjadi langkah kecil namun jika dilakukan dalam skala global akan berdampak signifikan.

Memahami tindak konsumerisme sebagai sebuah konstruksi struktural para kapitalis guna akumulasi profit, melalui produksi wacana kebutuhan maka diperlukan langkah strategis. Melalui filterisasi pemikiran dan paradigma neoliberalisme yang bersifat individualistis dan eksploitatif merupakan pintu utama dalam melakukan perubahan sederhana namun radikal. Hal inilah yang disebut oleh Negri dan Hardt, dimana perlawanan terhadap sebuah sistem rezim kemapanan dapat

dilakukan bahkan tanpa wadah sekalipun. Dengan begitu, ketika seluruh pihak mampu menjadi agen perlawanan atau multitude maka implikasi negatif dari proses globalisasi dapat dihindari khususnya melalui pemikiran kritis terutama memilah antara kebutuhan dan keinginan. Pada tataran inilah ketika dikatakan globalisasi membawa dampak negatif termasuk pada kehidupan sehari-hari, maka cara menanggulangnya ialah dengan cara melakukan perlawanan dari lini terkecil yaitu kebiasaan sehari-hari.

## VI. KESIMPULAN

Mega proyek MIFEE menjadi salah satu wujud pembangunan di suatu daerah meliputi agenda nasional berskala global. Proyek MIFEE hadir guna merespon krisis pangan dunia tahun 2008 melalui inovasi baru yaitu pengadaan lumbung pangan dan energi dunia. Melalui pembukaan lahan atas lahan ulayat di Merauke diharapkan produksi pangan meliputi jagung, kelapa sawit, padi dan tebu dapat dimaksimalkan memenuhi kebutuhan dunia. Proyek ini juga mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran serta meningkatkan perekonomian negara. Di lain sisi tujuan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat paska realisasi proyek seperti hilangnya hutan sebagai sumber kehidupan, kekeringan, lingkungan tercemar akibat limbah industri

ekstraktif, eksploitasi pekerja hingga konflik horizontal.

Kompleksitas permasalahan MIFEE dapat dipahami ketika memetakan terdapat kepentingan global beserta elite global yang berkepentingan. Logika neoliberalisme nampak nyata diadopsi ketika melihat proses pembentukan, penetapan kebijakan, minimnya partisipasi publik serta risiko industri ekstraktif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Agenda kapitalisme dalam akumulasi profit lintas negara melalui free market dan paradigma pembangunan dilakukan beserta penciptaan wacana doktrin kebutuhan. Misalnya, kebutuhan masyarakat akan produk berbahan baku kelapa sawit berujung pada tingkat konsumerisme. Dengan dalih pemenuhan kebutuhan global, maka ekspansi perkebunan pangan menjadi sebuah kebenaran ketika mengorbankan masyarakat lokal. Stakeholder dalam tataran ini yang berkolaborasi dalam menyukseskan pembangunan bersendikan neoliberalisme yang ekonomi deterministik disebut sebagai empire (seperti: pemerintah, korporasi, lembaga donor internasional).

Perlawanan masyarakat kontra MIFEE bahkan dengan mudah diakomodir dengan berbagai cara oleh para empire, bahkan mengerahkan aparat negara. Alih-alih sukses masyarakat justru dianggap sebagai

penghambat kemajuan dan tidak mampu beradaptasi dengan dunia global. Marjinalisasi masyarakat semakin dirasakan khususnya di negara sedang berkembang sebagai dampak atas globalisasi sebagai fakta sosial. Maka dari itu, dioerlukan alternatif solusi yaitu perlawanan bersifat radikal dan bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat tanpa terhalang waktu, jarak bahkan tanpa wadah apapun. Meminimalisasi tindak konsumerisme menjadi salah satu cara jitu untuk melawan dominasi sistem neoliberalisme yang berdampak buruk pada globalisasi. Memilih dan memilah antara kebutuhan dan keinginan menjadi penting sehingga perlawanan kecil ini jika dilakukan dalam skala global maka akan mampu mempengaruhi ekspansi kapitalisme dalam akumulasi profit yang semena-mena atas masyarakat bawah.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awasmiffee. (2017). *Pernyataan Sikap Aksi Hari HAM 2017 di Merauke*. Diakses pada 7 Oktober 2019. <https://awasmiffee.potager.org/?p=1588&lang=id>.
- Eller. (1989). *Bantuan Mematikan*. Jakarta: LP3ES.
- Gelbert, P. (2016). *Palm Oil Expansion In Indonesia: Land Grabbing As Accumulation by Dispossession*. (34), 65-99.
- Hadirman, F. (2017). *Dalam Moncong Oligarki*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardt, M., & Negri, A. (2000). *Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hardt, M., & Negri, A. (2004). *Multitude: War and Democracy In The Age Of Empire*. New York: The Penguin Press.
- Held, D. (1999). *Global Transformations*. Cambridge: Polity Press.
- Hiariej, E. (2004, November). Gerakan Anti Kapitalisme Global. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 139-160.
- Ismira, A. (2014). *Pengembangan Pertanian Pangan Skala Luas dan Socio-Environmental Conflict Dalam Kasus Merauke Integrated Food and Energy Estate*. diakses melalui ETD UGM.
- Polit, Denise F. 2003. *Nursing Research, Principles and Methods*. New Jersey: Lrancott Williams and Wilxins.
- Soekarno. (2004). *Indonesia Menggugat*. Yogyakarta: PUSTEP UGM.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, I., & Wahono, F. (2003). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: CPRC.
- Zakaria, R. Y., Kleden, E., & Franky, Y. (2011). *MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind*. Jakarta: Yayasan Pusaka.